



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1997
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai negara kepulauan merupakan sumber daya alam yang perlu dikelola secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
 - b. sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang merupakan pedoman perumusan kebijakan pokok pemantapan ruang wilayah nasional, serta penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
3. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
5. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan udara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya;
7. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
8. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
9. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan;
10. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

11. Kawasan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
12. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan;
13. Menteri adalah menteri yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengkoordinasikan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional ini mencakup strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional sampai dengan 100 meter dibawah permukaan bumi, satu kilometer di atas permukaan bumi dan batas luar zona ekonomi eksklusif.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. tujuan nasional pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. pola pemanfaatan dan struktur ruang wilayah nasional;
- c. kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan nasional pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu :

- a. mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. meningkatkan kesinambungan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis dan memperkuat integrasi nasional;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.

BAB III POLA PEMANFAATAN DAN STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan nasional pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional.
- (2) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung;
 - b. strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan budi daya;
 - c. strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan tertentu.

Pasal 6

- (1) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

(2) Untuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penetapan dan perlindungan terhadap kawasan lindung yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 1, Bagian Pertama pada BAB IV Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perlindungan terhadap kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup alam, lingkungan hidup sosial, dan lingkungan hidup buatan untuk meningkatkan kualitas dan fungsinya.
- (5) Perlindungan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada daerah yang berbatasan wilayah administratifnya diserasikan satu sama lain.

Pasal 7

- (1) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi langkah-langkah pengembangan kawasan budi daya secara terpadu.
- (2) Pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, pengembangan sistem permukiman, pengembangan jaringan transportasi nasional, pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional, pengembangan jaringan telekomunikasi nasional, serta pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional.
- (3) Untuk mewujudkan keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang saling mendukung serta mencegah dampak negatif yang dapat terjadi terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat setempat dilakukan penetapan kawasan budi daya berdasarkan kriteria kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 1 Bagian Kedua pada BAB IV Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Di dalam kawasan budi daya dipilih kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional.

(5) Kawasan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Kawasan budi daya, termasuk di dalamnya yang meliputi kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

- (1) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi langkah-langkah pengembangan kawasan tertentu secara terpadu.
- (2) Pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. mempercepat pertumbuhan kawasan sangat tertinggal;
 - d. menjamin upaya pertahanan keamanan negara;
 - e. memperkuat integrasi nasional;
 - f. melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - g. meningkatkan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penetapan kawasan tertentu berdasarkan kriteria kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf I bagian ketiga pada BAB IV Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir pada Lampiran VI Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional

Pasal 9

Pola pemanfaatan ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Pasal 10...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam;
 - d. kawasan pelestarian alam;
 - e. kawasan cagar budaya;
 - f. kawasan rawan bencana alam;
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan bergambut;
 - c. kawasan resapan air.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk.
 - d. kawasan sekitar mata air;
 - e. kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.
- (4) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. cagar alam;
 - b. suaka margasatwa;
- (5) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. taman nasional;
 - b. taman hutan raya;
 - c. taman wisata alam.
- (6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terbagi lagi dalam kawasan yang lebih kecil.

(7) Kawasan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (7) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir.
- (8) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. taman buru;
 - b. cagar biosfir;
 - c. kawasan perlindungan plasma mutfah;
 - d. kawasan pantai berhutan bakau.

Pasal 11

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan pertanian;
 - d. kawasan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan pariwisata;
 - g. kawasan pemukiman.
- (2) Kawasan hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap;
 - c. kawasan hutan yang dapat dikonversi.
- (3) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terbagi lagi menjadi kawasan yang lebih kecil.
- (4) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kawasan pertanian tanah basah;
 - b. kawasan pertanian tanah kering;
 - c. kawasan tanaman tahunan/perkebunan;
 - d. kawasan peternakan;
 - e. kawasan perikanan.

(5) Kawasan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (5) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi bahan-bahan galian yang dibagi atas tiga golongan, yaitu golongan bahan galian vital; atau golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam kedua golongan di atas.
- (6) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (7) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (8) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal.

Pasal 12

- (1) Sebaran kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya yang digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Sebaran kawasan budidaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga Struktur Ruang Wilayah Nasional

Pasal 13

Struktur ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun berdasarkan arahan sebagai berikut :

- a. arahan pengembangan sistem permukiman nasional;
- b. arahan pengembangan Jaringan transportasi nasional;
- c. arahan pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional;
- d. arahan pengembangan jaringan telekomunikasi nasional; dan
- e. arahan pengembangan prasarana dan sarana air baku nasional.

Pasal 14...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 14

- (1) Arahan pengembangan sistem permukiman nasional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pemerintahan dan pusat pelayanan jasa baik bagi kawasan permukiman dan daerah sekitarnya.
- (2) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan dan pusat-pusat permukiman perdesaan.
- (3) Pusat-pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan saling terkait dengan tingkatan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal.
- (4) Pusat-pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari wilayah desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa sekitarnya.
- (5) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya.
- (6) Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 15

- (1) Arahan pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan negara, menggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyebaran pusat-pusat permukiman, serta sektor terkait lainnya.
- (2) Jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antarpulau, pusat permukiman, kawasan produksi, pelabuhan laut dan udara, sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi darat, laut dan udara.
- (3) Jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan transportasi darat, jaringan transportasi laut, dan jaringan transportasi udara.

(4) Jaringan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan saling meliputi wilayah nasional dengan luar negeri, antarwilayah dan antarkota, dan dalam keterkaitan intra dan intermoda transportasi.

Pasal 16

Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi jaringan jalan darat, jaringan jalur kereta api, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, serta jaringan transportasi jembatan dan terowongan antarpulau.

Pasal 17

- (1) Jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari jaringan arteri dan jaringan kolektor primer.
- (2) Jaringan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar-Pusat Kegiatan Nasional, antar-Pulau Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan antarkota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama.
- (3) Jaringan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar-Pulau Kegiatan Wilayah, antar Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal dan/atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Arah pengembangan jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi jalur kereta antarkota dan jalur kereta api perkotaan.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititik beratkan pengembangannya pada:

a) jalur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a) jalur kereta api kapasitas tinggi di Pulau Jawa;
 - b) jalur kereta api lintas Sumatera;
 - c).jalur kereta api untuk melayani angkutan barang khusus di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
- (3) Jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya pada jalur kereta api untuk angkutan massal di kota-kota besar.
 - (4) Arah pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19

- (1) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi jaringan transportasi sungai, jaringan transportasi danau, dan jaringan transportasi penyeberangan termasuk alur pelayaran dan sarannya.
- (2) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Irian Jaya.
- (3) Jaringan transportasi danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya pada danau-danau besar.
- (4) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya pada penyeberangan lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan dalam wilayah nasional.
- (5) Arah pengembangan jaringan transportasi sungai, jaringan transportasi danau, dan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

- (1) Alur pelayanan sungai dan danau sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan klasifikasi alur.
- (2) Penetapan klasifikasi alur pelayanan sungai dan danau dilakukan dengan memperhatikan serana dan pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengairan.
- (3) Penetapan klasifikasi alur pelayanan sungai dan danau ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(4) Alur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Alur pelayaran penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran.

Pasal 21

Jaringan transportasi jembatan dan terowongan antarpulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dititikberatkan untuk melayani arus lalu lintas antarpulau yaitu antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, antara Pulau Jawa dan Pulau Madura, antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta di kawasan yang mendukung kelancaran kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain.

Pasal 22

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa pelabuhan laut dan alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam klasifikasi pelabuhan laut utama dan pelabuhan pengumpan.

Pasal 23

- (1) Pelabuhan laut utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi pelabuhan utama primer, pelabuhan utama sekunder, dan pelabuhan utama tersier.
- (2) Pelabuhan utama primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional.
- (3) Pelabuhan utama sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
- (4) Pelabuhan utama tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.
- (5) Arah pengembangan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 24...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 24

- (1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama.
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama dan pengumpan pelabuhan regional.
- (4) Arah pengembangan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

Alur pelayanan di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran.

Pasal 26

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa bandar udara dan ruang lalu lintas udara.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam klasifikasi pusat penyebaran primer, pusat penyebaran sekunder, pusat penyebaran tersier, dan bandar udara bukan pusat penyebaran.

Pasal 27

- (1) Pusat penyebaran primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional atau beberapa propinsi dan berfungsi sebagai pintu utama untuk ke luar negeri.
- (2) Pusat penyebaran sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu propinsi dan terhubung dengan pusat penyebaran primer.

(3) Pusat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Pusat penyebaran tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan terhubung dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran sekunder.
- (4) Bandar udara bukan pusat penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.
- (5) Arah pengembangan bandar udara sebagai pusat penyebaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II dan Lampiran V Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Ruang lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam buku petunjuk penerbangan.

Pasal 29

- (1) Arahan pengembangan energi dan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan negara, menggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyebaran pusat-pusat permukiman.
- (2) Pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan jaringan kelistrikan
- (3) Pengembangan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pengembangan pusat-pusat permukiman, pusat-pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi.
- (4) Arahan pengembangan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 30...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 30

- (1) Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditujukan untuk menyediakan arus informasi agar dapat menunjang kegiatan sosial, ekonomi, memggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyeberangan pusat-pusat permukiman.
- (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi.
- (3) Pengembangan stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memeberikan pelayanan jasa telekomunikasi di seluruh wilayah nasional.
- (4) Pengembangan jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk melayani jasa telekomunikasi di seluruh wilayah nasional.
- (5) Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 31

- (1) Arahan pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air bersih dan kebutuhan air baku berbagai usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengembangan jaringan prasara dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan waduk di daerah aliran sungai termasuk jaringan distribusi ke kawasan-kawasan yang dilayaninya.
- (3) Pengembangan waduk sebagiamana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Arahan pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB IV
KRITERIA DAN POLA PENGELOLAAN
KAWASAN LINDUNG,
KAWASAN BUDI DAYA DAN KAWASAN TERTENTU

Bagian Pertama
Kriteria dan Pola Pengelolaan Kawasan Lindung

Paragraf 1
Kriteria Kawasan Lindung

Pasal 32

Kriteria kawasan lindung berupa ukuran dan/atau persyaratan yang digunakan untuk penentuan kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung.

Pasal 33

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih; dan/atau
 - c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 m atau lebih.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yaitu kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Pasal 34...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 34

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b adalah:
 - a. Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - b. Garis sempadan sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang.
 - c. Garis sempadan sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c yaitu daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (4) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d yaitu kawasan di sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.
- (5) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e adalah:
 - a. lokasi sasaran kawasan terbuka hijau termasuk didalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada di kawasan perkotaan;
 - b. hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 hektar;
 - c. hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur;
 - d. jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik;
 - e. jenis...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- e. jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohon-pohonan dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik.

Pasal 35

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah:
 - a. kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan swasta serta tipe ekosistemnya; dan/atau
 - b. mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. mempunyai kondisi alam, baik biota maupu fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; dan/atau
 - d. mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; dan/atau
 - e. mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi;
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b adalah:
 - a. kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari satu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya; dan/atau
 - b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi; dan/atau
 - c. merupakan tempat dan kehidupan begi jenis satwa migran tertentu; dan/atau
 - d. mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a adalah:
 - a. wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
 - b. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;

c. satu...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. satu atau beberapa ekosistem yang terdapat di dalamnya secara materi atau secara fisik tidak dapat diubah oleh eksploitasi maupun pendudukan oleh manusia;
 - d. memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
 - e. merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang dapat mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b adalah:
- a. merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang sudah berubah;
 - b. memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala alam;
 - c. mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat pemukiman penduduk;
 - d. mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli dan/atau bukan asli.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c adalah:
- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan nyaman;
 - b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
 - c. kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam;
 - d. mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk.

Pasal 37

Kriteria kawasan lindung untuk cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 38...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 38

Kriteria kawasan lindung untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir.

Pasal 39

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a adalah:
 - a. areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau
 - b. kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan cagar biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b adalah
 - a. kawasan yang mempunyai keperwakilan ekosistem yang masih alami dan kawasan yang sudah mengalami degradasi, modifikasi, dan/atau binaan;
 - b. kawasan yang mempunyai komunitas alam yang unik, langka, dan indah; dan/atau
 - c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alami dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; dan/atau
 - d. tempat bagi penyelenggaraan pemantauan perubahan-perubahan ekologi melalui kegiatan penelitian dan pendidikan.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf c adalah:
 - a. areal yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
 - b. areal dengan luasan tertentu yang memungkinkan kelangsung proses pertumbuhan jenis plasma nutfah tersebut.
- (4) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf d adalah:
 - a. areal yang ditunjuk merupakan daerah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut; dan/atau
 - b. areal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- b. areal tempat pemindahan satwa sebagai tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;
 - c. mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.
- (5) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf e yaitu kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.

Paragraf 2 Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 40

- (1) Pola pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.
- (2) Sararan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
 - b. mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.
- (3) Pola pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung.

Pasal 41

- (1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidroorologis tanah di kawasan hutan lindung sehingga ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan selalu dapat terjamin;
 - b. mengendalikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. mengendalikan hidrologi wilayah, berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta untuk melindungi ekosistem yang khas di kawasan bergambut;
 - c. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa:
- a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
 - c. menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melinsungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk;
 - d. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitar;
 - e. menjaga kawasan terbuka hijau kota di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara, dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
- (3) Langkah-langkah pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berupa perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam di kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (4) Langkah-langkah pengelolaan bagi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berupa pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran;

(5) langkah-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (5) langkah-langkah pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berupa perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi di kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (6) Langkah-langkah pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- (7) Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g berupa:
 - a. melindungi kawasan taman buru dan ekosistemnya untuk kelangsungan perburuan satwa;
 - b. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan cagar biosfer untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unit, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan seluruh unsur-unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan;
 - c. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan daerah perlindungan plasma nutfah untuk melindungi daerah dan ekosistemnya, serta menjaga kelestarian flora dan fauna;
 - d. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan daerah pengungsian satwa untuk melindungi daerah dan ekosistemnya bagi kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
 - e. melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan kawasan pantai berhutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau, tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, dan pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangkannya;

Pasal 42

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administrasinya dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pada...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Pada Daerah lindung Tingkat II, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (3) Pada Daerah Tingkat I, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasar arahan pengelolaan kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.
- (4) Dalam hal Pemerintah Tingkat II menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputusan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah Tingkat I menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penerbitan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 43

- (1) Kegiatan pengawasan dalam pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dilakukan melalui:
 - a. pemberian larangan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan, kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
 - b. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
 - c. pencegahan berkembangannya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - d. pengawasan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam agar pelaksanaan kegiatannya tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan;
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatur lebih lanjut oleh Menteri yang berwenang, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

(2) Kegiatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Kegiatan enerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 6) dilakukan melalui:
- a. penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
 - b. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu kepada fungsi lindung yang diharapkan secara bertahap;
 - c. penegakan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan rehabilitasi daerah bekas penambangan pada kawasan lindung yang dilakukan kegiatan penambangan bahan galian.

Bagian Kedua

Kriteria dan Pola Pengelolaan Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Kriteria Kawasan Budi Daya

Pasal 44

Kriteria kawasan budi daya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai usaha dan/atau kegiatan dan yang dibagi dalam:

- a. kriteria teknis sektoral, yaitu ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan dalam kawasan memenuhi ketentuan-ketentuan teknis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kesesuaian ruang, dan bebas bencana; dan
- b. kriteria ruang, yaitu ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan budidaya dalam kawasan, menghasilkan nilai sinergi terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang didasarkan pada azas-azas sebagai berikut:
 - 1) saling menunjang antar kegiatan yang meliputi:
 - a) peningkatan daya guna pemanfaatan ruang serta sumber daya yang ada di dalamnya guna perkembangan kegiatan sosial ekonomi dan budaya;
 - b) dorongan terhadap perkembangan kegiatan sekitar.
 - 2) kelestarian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- 2) kelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi:
 - a) jaminan terhadap ketersediaan sumber daya dalam waktu panjang;
 - b) jaminan terhadap kualitas lingkungan hidup.
- 3) tanggap terhadap dinamika perkembangan yang meliputi:
 - a) peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b) peningkatan pendapatan daerah dan nasional;
 - c) peningkatan kesempatan kerja;
 - d) peningkatan ekspor;
 - e) peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya.

Pasal 45

- (1) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 125-174 di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
 - b. kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk budi daya hutan dapat memberikan manfaat:
 - 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 2) meningkatkan fungsi lindung;
 - 3) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
 - 4) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - 5) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - 6) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
 - 7) meningkatkan ekspor;
 - 8) mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
- (2) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah:

a. kawasan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam;
 - b. kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman dapat memberi manfaat:
 - 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 2) meningkatkan fungsi lindung;
 - 3) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
 - 4) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - 5) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - 6) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
 - 7) meningkatkan ekspor;
 - 8) mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
- (3) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah:
- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam;
 - b. kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain apabila dapat memberikan manfaat:
 - 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 2) meningkatkan fungsi lindung;
 - 3) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
 - 4) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - 5) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - 6) meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- 6) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
 - 7) meningkatkan ekspor;
 - 8) mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
- (4) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah:
- a. luas minimal 0,25 hektar dan mempunyai fungsi hidrologis/pelestarian ekosistem, luas penutupan tajuk minimal 50 persen dan merupakan tanaman cepat tumbuh.
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan hutan rakyat secara ruang dapat memberikan manfaat:
 - 1) meningkatkan perkembangan pmbnagunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 2) meningkatkan fungsi lindung;
 - 3) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - 4) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di daerah setempat;
 - 6) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - 7) meningkatkan ekspor;
 - 8) mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

Pasal 46

- (1) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a adalah:
- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah;
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah secara ruang dapat memberikan manfaat untuk:
 - 1) meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) meningkatkan fungsi lindung;
 - 4) meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- 4) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) menciptakan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b adalah:
- a. kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian lahan kering;
 - b. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat untuk:
 - 1) meningkatkan produksi pertanian dan mendayagunakan investasi;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) meningkatkan fungsi lindung;
 - 4) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) menciptakan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan tanaman tahunan/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c adalah:
- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan;
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan secara ruang dapat memberikan manfaat untuk:
 - 1) meningkatkan produksi perkebunan dan mendayagunaan investasi;

2) meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) meningkatkan fungsi lindung;
 - 4) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d adalah:
- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sbagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok, maupun industri;
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan peternakan secara ruang dapat memberikan manfaat:
 - 1) meningkatkan produksi peternakan dan mendayagunakan investasi;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) meningkatkan fungsi lindung;
 - 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatan pendapatan dan daerah;
 - 7) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e adalah:
- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan;
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan perikanan secara ruang dapat memberikan manfaat:

1) meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 1) meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) meningkatkan fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan dan daerah;
- 7) meningkatkan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor;
- 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 47

Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) adalah:

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan, serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertambangan secara ruang akan memberikan manfaat dalam:
 - 1) meningkatkan produksi pertambangan;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
 - 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan perkembangan masyarakat.

Pasal 48...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 48

Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) adalah:

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan industri secara ruang dapat memberikan manfaat dalam:
 - 1) meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
 - 4) tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan ekspor;
 - 9) meningkatkan perkembangan masyarakat.

Pasal 49

Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) adalah:

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan;
- b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang dapat memberikan manfaat dalam:
 - 1) meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
 - 4) tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;

6) meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) meningkatkan kesempatan kerja;
- 8) melestarikan budaya;;
- 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 50

Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) adalah:

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha;
- b. kawasan yang apabila digunakan untuk permukiman dapat memberikan manfaat:
 - 1) meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
 - 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
 - 4) tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam;
 - 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - 7) meningkatkan kesempatan kerja;
 - 8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 51

- (1) Pola pengelolaan kawasan budi daya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia untuk menyasrakan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengelolaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Pengelolaan kawasan budi daya dilakukan secara seksama dan berdaya guna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis seperti daya dukung dan kesesuaian tanah, aspek sosial serta aspek-aspek keruangan seperti sinergi kegiatan-kegiatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengelolaan kawasan budi daya diselenggarakan untuk:
 - a. terwujudnya pemanfaatan ruang dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. terhindarkannya konflik pemanfaatan sumber daya dengan pengertian pemanfaatan ruang harus berdasarkan pada prioritas kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat.
- (4) Pola pengelolaan kawasan budi daya meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan budi daya dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.

Pasal 52

- (1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa :
 - a. menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan produksi terbatas, untuk memperoleh hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara , masyarakat, industri dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan produksi tetap, untuk memperoleh hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi guna mendukung pengembangan transportasi, transmigrasi, pertanian, permukiman, perkebunan, industri, dan lain-lain, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Langkah-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang, beserta sumber daya alam di tanah yang dibebani hak lainnya untuk meningkatkan penyediaan kayu bagi kepentingan rakyat dan bahan baku industri pengelolaan kayu, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa :
 - a. memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi pangan tanah basah di kawasan pertanian tanah basah, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi pangan tanah kering di kawasan pertanian tanah kering, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi perkebunan di kawasan perkebunan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. memanfaatkan tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi peternakan beserta hasil-hasilnya di kawasan peternakan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. memanfaatkan potensi wilayah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi perikanan di kawasan perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berupa memanfaatkan sumber daya mineral, energi dan bahan galian lainnya di kawasan pertambangan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Langkah-langkah pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e berupa memanfaatkan potensi kawasan peruntukan industri untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(6) Langkah-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (6) Langkah-langkah pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f berupa memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (7) Langkah-langkah pengelolaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g berupa memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan permukiman dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 53

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administrasinya dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada Daerah Tingkat II, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan budi daya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (3) Pada Daerah Tingkat I, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan arahan pengelolaan kawasan budi daya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Tingkat II menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah Tingkat I menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Menteri.

(6) Pengendalian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (6) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 54

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) dilakukan melalui :
 - a. pengkajian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, terutama yang berskala besar;
 - b. pengawasan terhadap proses pelaksanaan berbagai usaha dan/atau kegiatan berdasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang di kawasan budi daya agar terlaksana kelestarian antar kegiatan ruang di kawasan budi daya;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di kawasan budi daya agar tetap terjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan dan keberlanjutan usaha dan/atau kegiatan budi daya lainnya;
 - d. pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.
- (2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (6) dilakukan melalui :
 - a. penegakan prosedur perizinan dalam mendirikan bangunan untuk menjamin bangunan yang akan dibangun telah sesuai dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan;
 - b. dalam pemberian izin mendirikan bangunan, Pemerintah Daerah memperhatikan

Bagian Ketiga

Kriterian dan Pola Pengelolaan Kawasan Tertentu

Paragraf 1

Kreteria Kawasan Tertentu

Pasal 55

- (1) Kriteria kawasan tertentu adalah berupa ukuran dan/atau persyaratan yang digunakan untuk penentuan kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan tertentu.

(2) Kriteria...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (2) Kriteria kawasan tertentu adalah:
- a. kawasan yang mempunyai skala kegiatan produksi dan/atau potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang besar dan berpengaruh terhadap pengembangan aspek ekonomi, demografi, politik, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan wilayah sekitarnya;
 - b. kawasan yang mempunyai skala kegiatan produksi dan/atau potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang besar serta usaha dan/atau kegiatannya berdampak besar dan penting terhadap kegiatan sejenis maupun kegiatan lain baik di wilayah bersangkutan, wilayah sekitarnya, maupun wilayah negara;
 - c. kawasan yang memiliki faktor pendorong besar bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya;
 - d. kawasan yang mempunyai keterkaitan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional; dan/atau
 - e. kawasan yang mempunyai posisi strategis serta usaha dan/atau kegiatannya berdampak besar dan penting terhadap kondisi politik dan pertahanan keamanan nasional serta regional.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Kawasan Tertentu

Pasal 56

- (1) Pola pengelolaan kawasan tertentu bertujuan untuk:
- a. terselenggaranya penataan ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan, dalam rangka penataan ruang nasional atau ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya yang berada dalam kawasan tertentu;
 - c. mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara;
 - d. menciptakan nilai tambah dan pengaruh positif secara ekonomis dari pengembangan kawasan strategis, baik bagi pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

(2) Pola...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Pola pengelolaan kawasan tertentu meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan tertentu dan pengendalian pemanfaatan ruang

Pasal 57

Langkah-langkah pengelolaan kawasan tertentu berupa :

- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan potensinya, dapat mengarahkan pola investasi baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kawasan , meminimalkan konflik pemanfaatan ruang, dan mengupayakan sinergi pembangunan yang tinggi baik terhadap Daerah Tingkat II, Tingkat I maupun Nasional;
- b. memacu perkembangan kawasan/daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada secara optimal melalui pola investasi yang terarah, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat, dengan mengupayakan sinergi pembangunan yang tinggi;
- c. meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah tersebut melalui pelaksanaan program-program pembangunan secara terpadu dan lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya;
- d. meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi kawasan agar pertahanan keamanan negara dapat diselenggarakan secara optimal dan dapat mengantisipasi setiap bentuk ancaman yang akan timbul;
- e. memanfaatkan sumber daya alam ruang kawasan untuk mengembalikan keseimbangan dan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup di kawasan yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah pengelolaan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang berhasil guna, perlu disusun rencana tata ruang kawasan tertentu dengan memperhatikan keterpaduannya dengan Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 59...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 59

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertibandalam pemanfaatan ruang.

Pasal 60

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pengkajian dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, terutama bagi kegiatan yang berskala besar;
 - b. pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan berdasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang di kawasan tertentu agar terlaksana keserasian antar kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan tertentu;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di kawasan tertentu agar tetap terjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan dan keberlanjutan antarkegiatan yang prosedur dan tata caranya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di kawasan tertentu;
- (2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penegakan prosedur perizinan dalam mendirikan bangunan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan;
 - b. pemberian izin mendirikan bangunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 61

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah Negara Indonesia dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1 : 1.000.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 62

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional seara adil dan merata;
- b. mewujudkan ketetpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antarsektor;
- c. pengarahan lokasi investasi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
- d. penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 63

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional dapat dilakukan paling tidak 5 tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunay Peraturan Pemerintah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah, daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang mengenai pelaksanaan penataan ruang pad kawasan-kawasan di ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 66

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1997

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 96



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1997
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

UMUM

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) telah menghasilkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, dan telah meletakkan landasan yang kuat untuk memasuki tahap pembangunan selanjutnya. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik semakin baik, dan kebutuhan pokok rakyat semakin terpenuhi. Di bidang ekonomi terlihat peluang yang meyakinkan karena struktur ekonomi nasional semakin kuat.

Di samping peluang yang dimiliki, banyak tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II). Tantangan tersebut disebabkan adanya perubahan tuntutan dan keinginan masyarakat, baik karena perubahan kualitas hidup sebagai akibat kemajuan pembangunan maupun pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi.

Upaya pembangunan nasional harus ditingkatkan terus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang.

Pembangunan dilakukan melalui tujuh bidang pembangunan dengan meletakkan titik berat pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumber daya manusia, dan didorong untuk saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang lainnya.

Dalam melaksanakan pembangunan, penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, Rencana Tata Ruang wilayah Nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif.

Rencana...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Rencana tata ruang yang memadukan dan menyeraskan tata guna tanah, air, dan sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sebagai pedoman untuk pengarahannya investasi pembangunan nasional dan sebagai dasar perencanaan pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan penataan ruang harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional melalui penterjemahan tujuan dan sasaran pembangunan nasional PJP II ke dalam rencana pola pemanfaatan dan struktur ruang nasional yang meliputi indikasi sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya dan sektor-sektor yang perlu dikembangkan di dalamnya, arahan pengembangan sistem permukiman dan arahan pengembangan jaringan prasarana dan sarana dasar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Tujuan nasional pemanfaatan ruang adalah pemanfaatan ruang wilayah nasional secara berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan secara berkelanjutan melalui upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya alam di dalamnya secara berhasil guna dan berdaya guna, keseimbangan antarwilayah dan antarsektor, pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Pola pemanfaatan ruang nasional adalah gambaran secara indikatif yang memperlihatkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Struktur pemanfaatan ruang nasional adalah struktur yang memperlihatkan arahan pengembangan jaringan transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, dan pengairan dalam upaya untuk mendukung sistem permukiman dan kawasan.

Huruf c...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Kriteria kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu adalah ukuran-ukuran dan/atau syarat-syarat yang digunakan untuk menetapkan kawasan.

Pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu adalah bagian dari kegiatan penataan ruang nasional dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dari masing-masing kawasan.

Pasal 4

Huruf a

Upaya mencapai pemanfaatan sumber daya alam dimaksud dilakukan melalui :

- 1) pemanfaatan sumber daya alam yang seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup;
- 2) pengarahannya lokasi investasi nasional dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu;
- 3) pengelolaan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya;
- 4) penetapan pokok-pokok kriteria penentuan kawasan budi daya serta kebijaksanaan pengelolaannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis adalah menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan pertahanan keamanan.

Huruf d

Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah kerusakan fungsi dan tatanannya dilakukan melalui :

- 1) peningkatan perlindungan bagi tanah, air, iklim, keanekaragaman hayati, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
- 2) pemeliharaan keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam serta kearifan tradisional;
- 3) penetapan pokok-pokok kriteria penentuan kawasan lindung serta kebijaksanaan pengelolaannya.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Strategi pengembangan kawasan lindung pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan pelestarian alam yang meliputi lingkungan hidup, alam dan suaka alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kegiatan sosial dan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, penelitian dan pembangunan prasarana dan sarana dasar pendukung sering tidak terelakkan harus dilakukan di dalam atau melalui kawasan lindung. Oleh karena itu, dalam batasan-batasan tertentu dan mengingat bahwa kawasan lindung diutamakan untuk pelestarian alam, di dalam kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan penelitian, eksplorasi dan produksi serta pembangunan prasarana dan sarana dasar pendukung dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan agar fungsi dan tatanan kawasan lindung dapat lestari.

Bagi kawasan lindung yang masih belum terganggu fungsi lindungnya dilakukan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Perlindungan kawasan mencakup pula pengembalian fungsi kawasan lindung yang telah terganggu.

Ayat (2)

Kawasan lindung yang ditetapkan secara indikatif dalam Rencana Tata Ruang wilayah Nasionalmerupakan kawasan yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan penanganan lintas sektoral.

Pelaksanaan perlindungan terhadap kawasan lindung harus dilakukan secara lintas sektoral.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kelestarian manfaatnya bagi semua orang melalui peningkatan keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang saling berhubungan, serta pencegahan dampak negatif yang dapat terjadi terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Ayat (2)

Pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan budi daya dilakukan untuk meningkatkan kegiatan produksi dan jasa yang bersumber dari potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan satu dengan yang lainnya beserta prasarana penunjangnya di kawasan budi daya dilakukan secara selaras dan serasi sehingga tercipta sinergi antarkegiatan dalam mewujudkan tata ruang yang optimal, efisien, tertib, dan teratur.

Dalam kaitannya dengan pertahanan keamanan negara, pengembangan berbagai usaha di kawasan budi daya dapat mendukung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta serta terbina keserasian dan saling menguatkan antara kegiatan pertahanan keamanan dan berbagai kegiatan usaha.

Pengembangan kawasan budi daya dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. kawasan budi daya yang berada di dalam ruang daratan dan ruang lautan dikembangkan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan secara saling menguatkan, serasi dan selaras dengan perkembangan sektor produksi dan jasa serta kawasan permukiman dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, prasarana pendukung dan kemampuan investasi nasional serta kondisi ekonomi global;

b. pengembangan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. pengembangan kegiatan budi daya beserta prasarana penunjangnya di darat, di laut, dan di udara dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pengaturan penggunaan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara yang berlaku agar dapat menghasilkan sinergi antarkegiatan dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, teratur, berhasil guna, selaras, dan serasi dalam menunjang kegiatan pembangunan;
- c. kawasan budi daya dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat :
 - 1) menyebarkan pengembangan usaha dan/atau kegiatan budi daya unggulannya di wilayah nasional untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan antarwilayah dan/atau antarkawasan dengan memperhatikan potensi daerah, permukiman dan penduduk, kemampuan investasi nasional dan sumber daya buatan dan kondisi ekonomi global;
 - 2) meningkatkan keterkaitan dan saling menguatkan antarkawasan termasuk kawasan andalan dalam wilayah nasional untuk meningkatkan sinergi perkembangan sebesar-besarnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan disekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional ini kemudian disebut sebagai Kawasan Andalan. Kawasan Andalan ditentukan berdasarkan potensi yang ada, memiliki aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, serta pertimbangan perkembangan daerah sekitarnya.

Dalam Kawasan Andalan diindikasikan sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumber daya alam kawasan.

Kawasan ini ditetapkan untuk mengupayakan sinergi keselarasan pengembangan antarwilayah dan antarsektor.

Ayat (5)

Kawasan budi daya, termasuk di dalamnya meliputi kawasan andalan yang ditetapkan secara indikatif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan kawasan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

Ayat (1)

Pengembangan kawasan tertentu disusun berdasarkan pada nilai strategis penetapan kawasannya dilihat dari segi pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan serta prioritas pengembangan kawasan dalam skala nasional. Pengembangan kawasan tertentu diselenggarakan secara serasi dan selaras dengan kawasan sekitarnya.

Dalam perencanaan pembangunan, perlu ditetapkan kawasan-kawasan yang mempunyai pengaruh besar terhadap upaya pengembangan tata ruang wilayah sekitarnya, mempunyai dampak besar dan penting serta merupakan faktor pendorong bagi kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan rakyat semesta dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Kawasan-kawasan ini disebut kawasan tertentu dan diprioritaskan penataan ruangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan tertentu yang ditetapkan secara indikatif dalam Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan kawasan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Pola pemanfaatan ruang wilayah Nasional ini digunakan sebagai acuan untuk mengarahkan peruntukan ruang bagi penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh, ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik ataupun hak lainnya dan arealnya berada di luar kawasan hutan negara. Hutan rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama orang lain atau badan hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang mencakup:

a. obyek...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna;
- b. obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Ayat (8)

Kawasan permukiman dimaksud dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ruang wilayah nasional diindikasikan kawasan-kawasan hutan lindung serta kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, agar lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat dipertahankan kelestariannya sejalan dengan pengembangan kegiatan budi daya dan pusat-pusat permukiman. Oleh karena itu kawasan hutan lindung serta kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya diupayakan membentuk satu kesatuan dalam setiap pulau dan berdampingan secara serasi, selaras dan saling memperkuat dengan pengembangan kawasan budi daya dan kawasan andalan serta pusat-pusat permukiman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengembangan pusat-pusat permukiman dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam ruang wilayah nasional, sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah nasional.

Pengembangan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pengembangan pusat-pusat permukiman diserasikan dengan sistem permukiman, jaringan prasarana dan sarana, serta peruntukan ruang lain yang berada di dalam kawasan budi daya wilayah sekitarnya, yang ada maupun yang direncanakan, sehingga pengembangannya dapat meningkatkan mutu pemanfaatan ruang yang ada.

Ayat (2)

Dalam pusat-pusat permukiman dikembangkan kawasan-kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis.

Dalam pusat-pusat permukiman dikembangkan jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat-pusat permukiman dimaksud dalam wilayah nasional.

Pusat-pusat permukiman dibangun agar terwujud lingkungan permukiman yang harmonis dan serasi sehingga terbentuk tata lingkungan yang bermutu dan adil bagi seluruh anggota masyarakat yang ada di dalam maupun di sekitarnya.

Ayat (3)

Dalam upaya meningkatkan daya guna penyediaan prasarana, pusat-pusat permukiman perkotaan perlu disusun secara berjenjang menurut fungsi dan besarnya. Pusat-pusat permukiman perdesaan disusun terkait dengan pusat permukiman perkotaan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat-pusat permukiman saling terkait, berjenjang dan dapat menguatkan perkembangan kota dan desa yang serasi dan saling memperkuat.

Rencana pengembangan sistem permukiman meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hirarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang danantisipasi perkembangan di masa yang akan datang.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya sertasebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa propinsi dan nasional, dengan kriteria penentuan: kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang cakupan pelayanannya berskala nasional/beberapa propinsi, pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional/beberapa propinsi, simpul transportasi secara nasional/beberapa propinsi, jasa pemerintahan untuk Nasional/beberapa propinsi, jasa publik yang lain untuk Nasional/beberapa propinsi.

Pusat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten, dengan kriteria penentuan: pusat jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten, pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani kabupaten, simpul transportasi untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa pemerintahan untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa yang lain untuk beberapa kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kriteria penentuan: pusat jasa keuangan/ bank yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan, pusat pengolahan/pengumpul barang untuk beberapa kecamatan, jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan, bersifat khusus dalam arti mendorong perkembangan sektor strategis.

Ayat (4)

Pusat-pusat permukiman perdesaan tersebut memiliki intensitas kegiatan ekonomi non-pertanian cukup beragam.

Ayat (5)

Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat permukiman perkotaan mempunyai fungsi:

1. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
2. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yakni sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah;
3. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Dalam lingkup kawasan perdesaan, pusat-pusat permukiman perdesaan juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pengembangan jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selaras dan terpadu dengan pengembangan sistem permukiman dan sektor terkait lainnya.

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah, dan antarkota dalam ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

Ayat (4)

Jaringan transportasi harus dikembangkan saling terkait antara alat transportasi darat, laut, dan udara.

Pasal 16

Jaringan transportasi darat yang berupa jaringan transportasi jalan nasional dikembangkan dalam bentuk lintas pada masing-masing pulau untuk dapat menghubungkan dan memadukan kawasan-kawasan andalan, pusat-pusat permukiman dan pintu-pintu outlet dalam suatu jaringan. Dengan pendekatan ini dapat diupayakan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan serta kesatuan proses sosial ekonomi pada masing-masing pulau.

Di samping itu jaringan transportasi darat antarpulau dihubungkan dengan lintas dan/atau jembatan penyeberangan sehingga secara menyeluruh wilayah nasional dapat membentuk satu kesatuan proses politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyeberangan lintas utara ialah penyeberangan dari Sabang sampai Jayapura melalui Pontianak, Nunukan, Manado, Ternate dan Biak. Penyeberangan lintas tengah ialah penyeberangan dari Palembang sampai Jayapura melalui Banjarmasin, Ujung Pandang, Kendari, Ambon, Sorong dan Biak. Penyeberangan lintasselataniahpenyeberangan dari Sabang sampai Merauke melalui Jakarta, Bali, Bima, Kupang, Dilli dan Tual. Penyeberangan tersebut dilaksanakan dengan feri penyeberangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Pengembangan jaringan transportasi antarpulau selain berupa jembatan, dapat berupa terowongan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (2)

Pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional memperlihatkan jaringan kelistrikan yang melayani kota atau kawasan andalan dan pusat-pusat permukiman sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Daerah atau pulau yang tingkat perkembangannya tinggi dan merata didukung oleh jaringan interkoneksi tegangan tinggi untuk kedayagunaan pengadaan energi listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah negara dan penggunaan kemajuan teknologi yang sesuai.

Ayat (2)

Jaringan telekomunikasi nasional yang memperlihatkan indikasi jaringan telekomunikasi untuk melayani kota atau kawasan yang dibedakan atas jaringan komunikasi kabel laut, jaringan komunikasi gelombang mikro, dan jaringan komunikasi terestrial darat. Jaringan komunikasi satelit tidak digambarkan karena berada di luar batas ruang wilayah udara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 31

Ayat (1)

Pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pengembangan sistem permukiman yang didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan air baku untuk permukiman dan kegiatan budi daya dengan ketersediaan sumber daya air, dengan memperhatikan teknologi, investasi nasional, lingkungan hidup alam, lingkungan hidup sosial, budaya, dan hidrologi wilayah.

Ayat (2)

Prasarana dan sarana air baku nasional memperlihatkan sebaran waduk dan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) atau Daerah Aliran Sungai (DAS), dan kawasan yang perlu dilayani oleh tiap-tiap DPS atau DAS.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai.

Huruf c

Mengingat tingkat kepadatan penggunaan lahan di daerah perkotaan terutama yang terletak di sepanjang jalan sangat tinggi, maka penetapan garis sempadan sungai yang berada pada lokasi tersebut perlu ditetapkan lain dengan ketentuan yang berlaku bagi garis sempadan sungai pada umumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ciri-ciri jenis tanaman atau pohon yang cocok untuk ditanam pada kawasan ini antara lain :

- 1) perakarannya dalam, tidak mudah tumbang, tidak merusak jalanan atau bangunan;
- 2) tidak memerlukan perawatan yang intensif;
- 3) tanaman cepat tumbuh, berdaun rimbun dan berumur panjang;
- 4) mempunyai nilai estetika;
- 5) memiliki fungsi ekologi.

Huruf e...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Pengelolaan kawasan lindung dilakukan secara seksama dan berdayaguna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang meningkatkan fungsi lindung dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis seperti daya dukung dan kemampuan/kesesuaian tanah, aspek sosial, dan aspek-aspek keruangan seperti sinergi antarkegiatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 42...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pemberian larangan melakukan kegiatan budi daya, kecuali kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami antara lain pembuatan teras untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, pemanfaatan hasil hutan non kayu seperti buah-buahan, getah, damar, tengkawang dan lain-lain, dan harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan lindung yang bersangkutan; pembuatan menara pengawas satwa di taman nasional atau taman hutan raya dengan menggunakan konstruksi bambu atau kayu, sehingga yang berada langsung di permukaan tanah hanya keempat kakinya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Huruf d

Apabila ternyata dari kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka kegiatan budi daya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan kriteria teknis sektoral adalah ukuran untuk menyatakan kesesuaian tanah, kemampuan daya dukung dan kondisi yang aman dari bahaya bencana. Kriteria ini diterbitkan oleh berbagai instansi pemerintah yang menangani pertanian, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, pekerjaan umum, pertambangan dan energi dan lain-lain.

Berdasarkan kriteria teknis sektoral dan kriteria teknik ruang diperoleh beberapa kemungkinan/alternatif kegiatan budi daya yang dapat dilaksanakan pada suatu kawasan budi daya. Penetapan pilihan alternatif kegiatan budi daya didasarkan pada nilai manfaat yang optimal dan memberikan nilai sinergi terbesar dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Apabila permasalahan tersebut menyangkut instansi pusat, maka Menteri memberikan keputusannya, tetapi apabila permasalahannya hanya menyangkut Pemerintah Daerah Tingkat I, maka Menteri hanya memberikan persetujuan.

Ayat (6)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Apabila ternyata pada kegiatan dimaksud terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah, dan/atau kekayaan alam lainnya yang belum diusahakan dan dapat memberikan nilai tambah bagi rakyat banyak, maka kegiatan tersebut dapat diizinkan dengan persetujuan Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memelihara fungsi kawasan.

Huruf d

Apabila berdasarkan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 56

Ayat (1)

Pola pengelolaan kawasan tertentu dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan terselenggaranya pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras, dan seimbang, serta menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwaperencanaan tata ruang kawasan tertentu dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang terkait oleh pemerintah dan masyarakat. Perencanaan tata ruang kawasan tertentu dilakukan secara terpadu dan mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, perencanaan tata ruang kawasan tertentu mempertimbangkan adanya prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan, serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang di kawasan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Apabila ternyata pada kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatanlain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah, dan/atau kekayaan alam lainnya yang belum diusahakan dan dapat memberikan nilai tambah bagi rakyat banyak, maka kegiatan tersebut dapat diizinkan dengan persetujuan Menteri,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memelihara fungsi kawasan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Apabila berdasarkan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 62

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional dijadikan acuan bagi instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Dalam hal ini pemanfaatan ruang yang terkait dengan rencana pembangunan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pengarahan investasi swasta dan masyarakat diupayakan serasi, selaras, dan mempertegas arahan program-program pembangunan sektoral dan regional yang dijabarkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3721



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1997
TANGGAL 30 Desember 1997

ARAHAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

PUSAT PENYEBARAN

PRIMER	SEKUNDER	TERSIER
Jakarta	Palembang	Timika
Medan	Jayapura	Bima
Ujung Pandang	Pontianak	Nabire
Surabaya	Banjarmasin	Wamena
Denpasar	Ambon	Bengkulu
Menado	Mataram	Pangkal Pinang
Biak	Pekanbaru	Manokwari
Balikpapan	Palangkaraya	Ternate
Batam	Padang	Gorontalo
Solo	Tarakan	Maumere
	Kupang	Ende
	Bandung	Pangkalan Bun
	Merauke	Kendari
	Semarang	Bandar Lampung
	Banda Aceh	Jambi
	Palu	Kupang
	Dilli	
	Tanjung Pinang	
	Samarinda	
	Tanjung Pandan	
	Sampit	
	Katapang	
	Waingapu	
	Yogyakarta	
	Sorong	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN VI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1997
TANGGAL 30 Desember 1997

DAFTAR KAWASAN TERTENTU

1. Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek).
2. Kawasan Gersik, Bangkalan, Kertosono, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila).
3. Kawasan Denpasar dan sekitarnya.
4. Kawasan Industri Lhokseumawe.
5. Kawasan Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang) dan sekitarnya termasuk segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle).
6. Kawasan Batam, Bintan dan kawasan-kawasan lain di Propinsi Riau dan Sumatera Barat yang termasuk dalam segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura (Indonesia, Malaysia, Singapore Growth Triangle).
7. Kawasan Pulau Natuna dan sekitarnya.
8. Kawasan Palembang dan sekitarnya.
9. Kawasan Teluk Ratai dan sekitarnya.
10. Kawasan Borobudur dan sekitarnya.
11. Kawasan Bontang dan sekitarnya.
12. Kawasan Nunukan dan sekitarnya.
13. Kawasan Soroako dan sekitarnya.
14. Kawasan Toraja dan sekitarnya.
15. Kawasan Bitung dan sekitarnya.
16. Kawasan Timika.
17. Kawasan Biak.
18. Kawasan Kahayan-Kapuas-Barito (KAKAB).
19. Kawasan Bogor, Puncak, Cianjur, Tangerang.
20. Kawasan Perbatasan Kalimantan-Serawak (Malaysia).
21. Kawasan Perbatasan Irian Jaya - Papua Nugini.
22. Kawasan Perbatasan Sangihe Talaud dan sekitarnya.
23. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Siabu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO